

Cari Solusi Macet, Pemkot Ngadu Ke Pemprov

Category: Daerah

19 September 2025



BANDUNG, Prolitenews – Kemacetan di Kota Bandung sampai hari ini belum teratasi, namun Pemkot bersama Provinsi Jawa Barat menurut Wakil Wali Kota Bandung Erwin tengah mengupayakan.

Hal itu Erwin sampaikan pada rapat koordinasi infrastruktur di Jawa Barat antara Gubernur dengan seluruh kepala daerah di Jawa Barat.

“Didampingi oleh Kadishub dan DSABM, kami mewakili menyampaikan penyebab macet di Kota Bandung bisa diatasi,” jelas Erwin.

Disampaikan Erwin, ada 11 titik rawan yang memang saat ini diperlukan untuk diberikan solusi.

“Jadi, ada lintasan yang menyebabkan sering buka-tutup, ya. Gedebage, Cimencrang, Cisaranten Kulon, Parakan Saat, Laswi, Ahmad Yani, Jalan Sunda, Jalan Sumatra, Jalan Merdeka, Jalan

Braga, tentunya yang sebelah sana Nurtanio yang sekarang lagi pas pembangunan,” paparnya.

Menurutnya ini adalah lintasan sebidang yang menyebabkan sering buka-tutup menyebabkan kemacetan karena jalannya yang kecil sehingga agak sulit kita untuk membangun flyover.

“Sehingga, mohon ada bantuan dari pihak kereta api yang mungkin akan disampaikan, karena tadi saya belum sempat juga untuk dapat membuat, misalnya, flyover kereta api. Jadi, kereta api yang naik ke atas, gitu, kan. Nah, seperti itu,” tuturnya.

Lanjut Erwin, pertama untuk keamanan rencananya akan dibuat flyover kereta api bukan flyover jalan.

Namun demikian hal itu kata dia menjadi kendala. Kemudian di Bundaran Cibiru dipastikan masih saja macet terus belum ada solusi terlebih jalan tersebut milik pemerintah pusat.

“Nah, tentunya kami minta kepada gubernur sebagai pintu masuk daerah timur, mohon dibantu gubernur untuk disampaikan kepada Kementerian PUPR untuk dapat dilakukan penataan apakah dibuktikan flyover atau underpass dari situ. Jadi mungkin itu termasuk juga mudah-mudahan juga kami akan mengajukan, karena banyak kecelakaan yang terjadi di Soekarno-Hatta ya. Ada yang nyeberang lintasan yang ke SMK 9, ke Uninus, kalau bisa dibangun juga,” harapnya.

Karena itu kan lahan milik pemerintah daerah, milik pemerintah provinsi. Ya, tentunya mudah-mudahan juga bisa disampaikan oleh para dinas ke sana. Karena tadi rapat terbatas ke Burung Kitamakan, dan teknisnya nanti oleh Kepala Dinas.